Globethics Repository



GENEALOGI LIBERALISASI PEMIKIRAN ISLAM

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Fahmy, Hamid
Publisher	IAIN Mataram
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-17 22:41:45
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/233140

ISSN 1411-3457

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XIII • Nomor 1 • Juni 2009

TERAKREDITASI Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas
Nomor: 65a/DIKTI/Kep/2008

PEMIKIRAN FIQH DAN SPIRIT TRANSFORMASI SOSIAL
Miftahul Huda

PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ÎD AL-ASYMÂWÎ TENTANG HISTORISITAS SYARI'AH
Mutawalli

ASAS RETROAKTIF PADA KASUS PELANGGARAN HAM (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Ikhwan

BMT DAN DEMOKRATISASI EKONOMI: MEMBUMIKAN EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA
Lukman Al-Hakim

DINAMIKA PEMIKIRAN FIQH DALAM NU: ANALISIS ATAS NALAR FIQH POLA MAZHAB
Ahmad Arifi

KOMPROMI DAN INTERSEKSIONALITAS GENDER DALAM PEMBERIAN MAHAR: TRADISI AMPA CO'I NDAI PADA SUKU MBOJO
Atun Wardatun

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab		Latin
ا	=	a
ب	=	b
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	sh
ض	=	dl
ط	=	th
ظ	=	zh
ع	=	‘
غ	=	gh

Arab		Latin
ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
و	=	w
ه	=	h
ء	=	’
ي	=	y

Untuk Madd dan Diftong

آ	=	â (a panjang)
اِيْ	=	î (i panjang)
اُوْ	=	û (u panjang)
اَوْ	=	aw
اَيْ	=	ay

ISI

TRANSLITERASI
ARTIKEL

Miftahul Huda	Pemikiran Fiqh dan Spirit Transformasi Sosial • 1-22
Mutawalli	Perspektif Muhammad Sa'îd al-Asymâwî tentang Historisitas Syari'ah • 23-58
Ikhwan	Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran HAM (Perspektif Hukum Islam) • 59-80
Kasjim Salenda	Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam • 81-108
Hamid Fahmy	Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam • 109-140
Rusli	Kontroversi Akhbârî-Ushûlî dalam Tradisi Pemikiran Syî'ah Imâmiyyah • 141-168
Lukman Al-Hakim	BMT dan Demokratisasi Ekonomi: Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia • 169-188
Ahmad Arifi	Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab • 189-216.
Atun Wardatun	Kompromi dan Interseksionalitas Gender dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Co'i Ndai pada Suku Mbojo • 217-236.

INDEKS

GENEALOGI LIBERALISASI PEMIKIRAN ISLAM

Hamid Fahmy*

Abstract

Liberalization of islamic thought is often related to or claimed as renewal of islamic thought (tajdid), yet the term 'liberal' itself has no root in islamic intellectual tradition, let alone the concepts offered by this movement. The genealogy of thought that underlines this movement is traceable from the trend of postmodernism and the remnant of modernism in the West. In fact, the shift from modernism to postmodernism in the West brought about the approaches of social and human sciences studies, including religious studies. Such doctrines that came along with the trend of thought in Western postmodernism as relativism, nihilism, pluralism, equality, feminism, democratization in all respect are doctrines that played pivotal role in liberalization of religious thought in the West. Now, those doctrines are playing in the mind of the exponent of liberalization of Islamic thought with almost the same rationale with the program of secularization.

Keywords: Genealogi, Liberalization, Postmodernism, Ijtihad, Islamic Thought, *Tajdîd*.

WACANA pembaruan pemikiran Islam yang belakangan marak diramaikan oleh sejumlah kalangan cendekiawan Muslim di beberapa perguruan tinggi Islam adalah pendekatan pemahaman Islam yang kemudian dikenal sebagai liberal. Istilah yang mulanya diperkenalkan oleh Greg Barton[1] itu kemudian digunakan sebagai nama kelompok kajian yang bernama Jaringan Islam Liberal. Model pendekatan kajian Islam ini, pascaperistiwa 11 September 2001, dianggap efektif oleh pihak Barat untuk meng-*counter* wacana dan pergerakan kelompok-kelompok

*Penulis adalah Direktur Pascasarjana ISID Gontor Ponorogo. email: hfzark@yahoo.co.uk

[1]Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Muslim radikal ekstrimis dan fundamentalis. Wacana liberalisasi pemikiran Islam ini akhirnya menjadi sebuah gerakan sosial-intelektual yang didesakkan melalui berbagai media massa cetak maupun elektronik, penerbitan buku-buku, jurnal ilmiah, dan gerakan lembaga swadaya masyarakat.

Kelompok liberal mengklaim bahwa liberalisasi adalah suatu ikhtiar pembaruan pemikiran Islam. Alasannya, pemahaman umat Islam selama ini hanya bersifat tekstual yang hanya mengacu pada al-Qur'an dan Hadis sehingga umat Islam "tidak berkembang, terbelakang, dan beku pada satu titik yang memprihatinkan".[2] Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual. Pemahaman dimaksud adalah pemahaman yang merespons atau menjustifikasi paham-paham pluralisme agama, feminisme dan gender, sekularisme, rasionalisme, demokratisasi dan yang terutama adalah penerapan cara berfikir liberal.[3]

Dari situ timbul masalah, terutama menyangkut substansi dari cara berfikir liberal. Pada tahun 2002, sejumlah organisasi seperti Persis Bandung, Muhammadiyah Jawa Barat, Dewan Masjid Indonesia, Partai Keadilan Solo, Partai Persatuan Pembangunan Solo, dan PWNU Jawa Timur kompak menolak paham liberal yang dianggap telah menghina Islam dan memutar-balikkan kebenaran.[4] Lebih jauh, bahkan, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 mengharamkan faham liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Fakta tersebut tak pelak menghadirkan situasi oposisi *binary* dalam konteks pemikiran Islam, yakni pandangan yang menggunakan pendekatan liberal

[2]Lihat situs Jaringan Islam Liberal, www.islib.com

[3]Untuk memahami Islam secara kontekstual kelompok ini mengusung ide bahwa wahyu tidak terputus, semua agama adalah sama benarnya (pluralisme agama), tidak ada hukum Tuhan, nikah beda agama adalah boleh, jilbab bagi wanita tidak wajib, dan sebagainya. Baca Ulil Absar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," *Harian Kompas*, 18 November 2002.

[4]Muchit A. Karim, "Faham Keagamaan Islam Liberal Pada Masyarakat Perkotaan di Makassar", dalam *Faham-Faham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan* (Jakarta: Hasil Penelitian Badan Litbang Departemen Agama, 14 November 2006).

yang dianut sekelompok Muslim berhadapan dengan pandangan mayoritas umat Islam yang nonliberal. Makalah ini akan melacak genealogi gerakan pemikiran liberal dan strategi penyebarannya ke dalam pemikiran umat Islam. Dari kajian ini diharapkan dapat dicapai gambaran apakah liberalisasi pemikiran Islam dapat dikategorikan sebagai *tajdîd* atau bukan.

Liberalisme Barat

Kata-kata liberal diambil dari bahasa Latin *liber* yang berarti bebas dan bukan budak atau suatu keadaan seseorang bebas dari kepemilikan orang lain. Makna "bebas" kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berfikir; ini disebut sebagai *the old liberalism*. Dari makna kebebasan berfikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna.

John Locke, seorang filosof Inggris, misalnya, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar (*natural right*) yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara. Liberal dalam ideologi politik mengandung maksud bahwa setiap individu adalah pusat yang memiliki kesamaan hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak untuk dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi.[5] Sementara dalam konteks sosial, liberal berarti suatu etika sosial yang membela kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) secara umum.[6] Liberalisme dalam ekonomi, menurut Alonzo L. Hamby, profesor sejarah di Universitas Ohio, adalah penekanan pada kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan kesempatan (*opportunity*).[7]

[5]Simon Blackburn, "Liberalisme," dalam *Oxford Dictionary of Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

[6]C. A. J. Coady, *Distributive Justice: A Companion to Contemporary Political Philosophy*, eds. Goodin, Robert, dan Pettit (Oxford: Blackwell Publishing, 1995), 440.

[7]Alan Brinkley, *Liberalism and Its Discontents* (Harvard: Harvard University Press, 1998); Lihat juga John Gray, *The Two Faces of Liberalism* (New York:

Cara berpikir bangsa-bangsa Barat sejatinya adalah cerminan dari *worldview* atau pandangan dunia Barat. Barat, mengutip al-Attas, adalah peradaban yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa dari peradaban Yunani Kuno yang dikawinkan dengan peradaban Romawi dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa terutama Jerman, Inggris, dan Perancis. Prinsip-prinsip asasi dalam filsafat, seni, pendidikan, dan pengetahuan diambil dari Yunani, sedangkan prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat.[8]

Paham liberalisme—baik politik, ekonomi, maupun agama—yang tumbuh di Barat itu sebenarnya adalah hasil pergumulan pemikiran yang diwarnai oleh wacana keagamaan Kristen dan kepercayaan, tradisi, kultur, ideologi serta nilai-nilai yang khas Barat. Unsur-unsur penting dari paham itu dapat dilacak dari dua fondasi utama peradaban Barat, yaitu modernisme dan posmodernisme, beserta kondisi religio-politik masa itu.

Modernisme. Liberalisme dapat dilacak akarnya dari modernisme. Modernisme adalah semangat yang disulut oleh pandangan hidup keilmuan (*scientific*) sehingga Barat modern dikenal dengan *scientific worldview*. Di Barat, pandangan tersebut telah memantik konflik yang amat serius dengan agama. Logis, karena pandangan hidup Barat yang saintifik itu sejatinya telah diwarnai oleh paham sekularisme, rasionalisme, empirisisme, cara befikir dikotomis, desakralisasi, pragmatisme, dan penafian kebenaran metafisis (baca: Agama). Pandangan hidup saintifik inilah akhirnya yang menafasi peradaban Barat modern. Alain Touraine menggambarkan modernitas sebagai berikut.

> The idea of modernity make science, rather than God, central to society and at best relegates religious belief to the inner realm of private life. The mere presence of technological applications of science does not allow us to speak of modern society. Intellectual activity must also be

New York Press, 2000); dan James T. Kloppenberg, *The Virtues of Liberalism* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

[8]Al-Attas SMN, *Risalah untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2000), 164-5; lihat juga al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 134.

> protected from political propaganda or religious beliefs; ….public and private life must be kept separate…..the idea of modernity is therefore closely associated with that of rationalization.[9]

Modernitas pada intinya adalah *state of mind* atau cara berfikir yang diaplikasikan ke dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, J. W. Schoorl mendefinisikan modernisasi menjadi "penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek kehidupan masyarakat".[10] Penerapan cara berfikir rasional ke dalam keseluruhan aspek kehidupan pada akhirnya menjelma menjadi suatu idea yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat rasional (*rational society*), yaitu suatu masyarakat yang segala kegiatannya termasuk bidang sains dan teknologi serta kehidupan politik dikontrol oleh rasio. Karena rasionalitas adalah satu-satunya prinsip yang mengatur kehidupan individu dan sosial termasuk kehidupan keagamaan, rasionalisasi berkaitan erat dengan tema sekularisasi. Tegasnya, dua elemen penting peradaban modern adalah rasionalisasi dan sekularisasi. Dengan kedua elemen ini, pandangan hidup Barat melepaskan agama dalam memandang segala sesuatu.[11] Dunia untuk dunia, agama untuk Tuhan, tidak ada hubungan antara agama dan dunia, antara agama dan politik.

Habermas menyatakan bahwa proyek modernisasi berkulminasi pada abad ke 18 M, di saat model pemikiran

---

[9](Terjemah: ide modernitas menjadikan sains, dan bukan Tuhan, sebagai sesuatu yang sentral dalam masyarakat, dan pada puncaknya mengenyampingkan kepercayaan agama kepada kehidupan pribadi yang terdalam. Sekadar adanya aplikasi teknologi yang berasal dari sains tidak cukup untuk membicarakan masyarakat modern. Kegiatan intelektual juga harus diproteksi dari propaganda politik atau kepercayaan agama; …kehidupan publik dan individu harus dipisahkan… oleh karena itu, ide modernitas berkaitan dengan ide rasionalisasi). Lihat Alain Touraine, *Critique of Modernity* (Oxford: Blackwell Publishing, 1995), 9-10.

[10]JW. Schoorl, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Berkembang*, ter. R G. Soekadijo (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1981), 4.

[11]Menurut Huston Smith pendekatan yang bersifat teistik para pemikir Barat, yang ditandai oleh pemikiran yang memposisikan konsep Tuhan secara sentral dalam berbagai diskursus hanya berjalan hingga abad kesebelas. Lihat Huston Smith, *Beyond The Post-Modern Mind: Quest Book* (Wheaton Illinois, USA : The Theosophical Publishing House, 1989), 5.

rasional menjanjikan liberalisasi masyarakat dari mitologi irasional, agama, dan takhyul.[12] Inilah gerakan sekularisasi yang sebenarnya yang berupaya untuk menyuntikkan gagasan desakralisasi ilmu dan organisasi sosial. Menurut James E. Crimmins, proses desakralisasi, atau dalam istilah Weber "disenchantment", ini memang sengaja diarahkan untuk melawan agama dan digambarkan sebagai agen utama untuk menggeser dan menggusur agama tradisional.[13] Hasil dari gerakan desakralisasi agama itu sendiri ialah peminggiran agama dari fungsinya yang sentral dalam kehidupan publik dan berbagai diskursus tidak dapat dielakkan. Alain Finkielkraut dalam bukunya *The Defeat of the Mind* menggambarkan kondisi agama pada era modern sebagai berikut.

> What they called God was no longer the Supreme Being, but collective reason……From now on God existed within human intelligence, not beyond it, guiding people's action and shaping their thoughts without their knowing it. Instead of communicating with all creatures, as His namesake did, by means of the Revelation, God no longer spoke to man in a universal tongue; He now spoke within him, in the language of his nation.[14]

Selain dari elemen rasionalisme dan sekularisme, Barat Modern juga menganut pandangan filsafat empirisisme, yakni suatu prinsip yang merupakan konsekuensi logis dari rasionalisme dan saintifisme. Yang terakhir adalah humanisme yang muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya proses sekularisasi, desakralisasi, dan *disenchantment of nature.*

---

[12]David Harvey, *The Condition of Postmodernity* (Cambridge: Blackwell, 1991), 12-3.

[13]James E.Crimmins (ed.), *Religions, Secularization, and Political Thought* (London: Routledge, 1990), 7.

[14](Terjemah: Apa yang mereka sebut Tuhan tidak lagi Maha Kuasa, tapi berupa akal kolektif… Mulai sekarang Tuhan telah berada dalam pikiran manusia, tidak di luar itu, Da mengarahkan tindakan masyarakat dan mempertajam pemikiran mereka tanpa mereka sadari. Sebagai ganti sarana komunikasi dengan semua makhluknya melalui wahyu, Tuhan berbicara dalam bahasa bangsa dan tidak lagi berbicara dengan bahasa universal). Lihat Alain Finkielkraut, *The Defeat of The Mind*, trans. Judith Friedlander (New York: Columbia University Press, 1995), 18.

Pendek kata, Barat Modern membebaskan kehidupan sosial dan intelektual dari campur tangan Tuhan dengan rasionalisme, sekularisme, empirisisme (positivisme), dualisme atau dikotomi, dan humanisme. Dengan itu rasio dan spekulasi filosofis menggantikan peran agama, segala sesuatu dianggap terbuka untuk perubahan. Kebenaran hanya bersumber pada realitas sosial, kultural, dan empiris yang terus berubah-ubah.

Posmodernisme. Dari posmodernisme akar liberalisme menjadi semakin jelas. Abad ke-19 adalah era modernitas mulai dipertanyakan oleh suatu gerakan filsafat yang berpegang pada prinsip yang meragukan bahwa realitas memiliki struktur yang dapat dipahami oleh manusia. Ini adalah pengingkaran terhadap absolutisme dan sekaligus merupakan serangan yang serius terhadap salah satu disiplin ilmu filsafat yang terpenting, yaitu metafisika objektif. Munculnya eksistensialisme dan filsafat analitik, yang merupakan dua gerakan yang sangat dominan kala itu, merupakan produk akal post-modern (*postmodern mind*). Inilah yang kemudian menggantikan sistim metafisika. Silverman menyatakan bahwa penutupan jalan pemikiran metafisika bertepatan dengan berakhirnya era modernisme.[15] Jadi, sistem baru yang disebut Post-Modernisme ini adalah sistem yang tanpa pemikiran metafisis. Penghapusan metafisika juga berimplikasi pada pengenyampingan atau "peremehan" doktrin keagamaan yang berdasarkan pada metafisika itu. Titik perubahan dari metode berfikir metafisis kepada metode berfikir analitis dapat dirujuk, misalnya, kepada pandangan-pandangan Karl Marx (1818-1883) dan Nietzsche (1844-1900) tentang agama.[16]

Secara filosofis posmodernisme juga merupakan gerakan yang tidak lagi memercayai kebenaran objektif atau saintifik yang menjadi ciri modernisme. Hal ini dapat dilacak dari pemikiran Immanuel Kant (1724-1804), GWF Hegel (1770-1830), dan juga Karl Marx yang menganggap bahwa masyarakat Barat adalah

[15]Hugh J. Silverman, "The Philosophy of Postmodernism", dalam *Postmodernism-Philosophy and the Art*, ed. Hugh J. Silverman (London: Routledge, 1990), 5.

[16]Untuk diskusi yang lebih detail mengenai hal ini lihat Nancy Love, *Marx, Nietzsche, and Modernity* (New York: Columbia University Press, 1986), khususnya Bab Satu hal. 1-7, dan Bab Empat hal. 113-34.

progresif, tidak pernah final dan akan menuju kesempurnaan dengan cara evolusi, perkembangan sosial, pendidikan dan pemanfaatan sains. Penolakan terhadap finalitas juga tercermin dalam filsafat post-strukturalisme yang menolak adanya "makna" yang tetap (*fixed meaning*) atau adanya keterkaitan antara bahasa dan dunia atau mengingkari realitas, kebenaran dan fakta yang tetap sebagai objek pencarian. Puncaknya dapat dilacak dari pikiran Nietzsche yang menghapuskan asumsi bahwa di sana terdapat pengetahuan objektif.

Nietzsche juga dikenal sebagai pemikir awal posmodernisme dengan idenya tentang program penghapusan nilai (*dissolution of value*) dan penggusuran tendensi yang mengagungkan otoritas. Ini merupakan karakteristik pandangan hidup Barat post-modern. Makna nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini absolut oleh agama dan masyarakat direduksi.[17] Doktrin penghapusan nilai yang terkenal yang didengungkan pertama kali oleh Nietzsche adalah doktrin nihilisme. Dalam karyanya *Will to Power,* Nietzsche menggambarkan nihilisme sebagai situasi di mana "manusia berputar dari pusat ke arah titik X"; artinya, nilai tertinggi mengalami devaluasi dengan sendirinya.[18] Heidegger (1889-1976) dengan nada yang sama mendefinisikan nihilisme sebagai "suatu proses pada akhirnya tidak ada lagi yang tersisa"[19] Keduanya mempunyai *mindset* dan kecenderungan yang sama saja. Dalam pandangan Nietzsche proses nihilisme adalah devaluasi nilai tertinggi yang membawa pada kesimpulan doktrin "kematian Tuhan". Dalam pandangan Heidegger nihilisme menunjukkan penghapusan *Being* dengan sedemikian rupa sehingga menjelma menjadi nilai. Di situ realitas tidak lagi dipahami dalam bentuk suatu susunan di mana sang pencipta berada pada puncak hierarki yang absolut. Keduanya menuju suatu titik di mana manusia tidak lagi berpegang pada struktur nilai, nilai tidak lagi mempunyai makna. Suatu konsep tentang

[17]Geovani Vattimo, *The End of Modernity*, trans. dan pengantar oleh Jon R. Snyder (Cambridge: Polity Press & Blackwell Publisher, 1988), 167.

[18]Friedrich Nietzche, *The Will to Power,* ter. Walter Kaufmann dan R.J. Hollingdale, ed. Walter Kaufmann (New York: Vintage Books, 1968), 8-9.

[19]Vattimo, *The End…*, 19.

apa pun tidak lagi berdasarkan pada sesuatu yang metafisis, religius ataupun mengandung unsur ketuhanan (*divine*).

Kendati doktrin yang kemudian disebut *European Nihilism* ini mengusung proyek devaluasi nilai, ia tetap mereka anggap sebagai suatu jalan baru dalam menentukan konsep nilai yang berbeda dari kepercayaan dalam agama. Nilai tidak lagi berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Jadi, nihilisme, kata Snyder, berhubungan dengan perubahan kebenaran ke dalam nilai, tapi nilai yang telah diwarnai oleh kepercayaan dan opini manusia.[20] Dalam terminologi Nietzsche, perubahan kebenaran menjadi sekadar nilai ini berbentuk apa yang dia istilahkan dengan "*will to power*." Ini berarti bahwa filsafat nihilisme bertujuan untuk mengkaji dan kemudian menghapuskan segala klaim yang dilontarkan oleh pemikiran metafisika tradisional. Metafisika, di mana konsep Tuhan merupakan fondasi pemikiran dan nilai, dihilangkan atau disingkirkan. Sebab, seperti yang dinyatakan Nietzsche, ketika metafisika telah mencapai suatu poin di mana kebenaran telah dianggap seperti Tuhan, sebenarnya itu tidak lebih dari nilai-nilai subjektif yang boleh jadi salah sebagaimana kepercayaan dan opini manusia yang lain. Baginya, tidak ada perbedaan antara benar dan salah; keduanya hanyalah kepercayaan yang salah (*delusory*) yang sama sekali tidak dapat diandalkan. Maka dari itu, kalau kita menolak kesalahan, kita juga harus menolak kebenaran. Membuang yang satu berarti juga harus membuang yang lain (*to do away with one is to do away with other too*).[21] Berdasarkan pada doktrin ini, Nietzsche mendefinisikan metafisika secara pejoratif sebagai "ilmu yang membahas tentang kesalahan manusia yang fundamental, seakan-akan semua itu kebenaran yang fundamental".[22] Serangan doktrin nihilisme terhadap metafisika ini menunjukkan dengan jelas serangan terhadap agama sebagai asas bagi moralitas.

Teori tentang *European Nihilism* dapat dilihat dengan lebih jelas lagi dari apa yang kini disebut sebagai "*the philosophy of*

[20]*Ibid*., xi.

[21]Friedrich Nietzsche, *Twilight of the Idol,* (trans.) R.J. Hollingdale (Harmondsworth: Penguin, 1968), 41. Nietzsche juga pernah bilang, "Truth is the kind of error". Lihat Friedrich Nietzsche, *The Will…,* 493.

[22]Vattimo, *The End*…, xii.

difference" yang dinisbatkan kepada Nietzsche dan Heidegger. Segala perbedaan antara kepalsuan dan kebenaran, rasional dan irasional harus diletakkan di luar jangkauan bahasa dan konsep-konsep yang melekat dengannya. *Difference* adalah produk dari "*will to power*" (kehendak untuk berkuasa) yang ada dalam diri manusia atau kehendak untuk menafsirkan (*will to interpret*). Ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dalam pengalaman kita di dunia tidak kurang dan tidak lebih dari suatu penafsiran; segala sesuatu di dunia ini selalu ditafsiri sesuai dengan nilai-nilai subjektif dalam diri kita. Karena kecenderungan untuk selalu menafsirkan itulah, maka bagi post-modernis dunia yang dapat diketahui hanyalah dunia yang berbeda-beda atau dunia interpretasi. *The philosophy of difference* ini kemudian menjadi salah satu penghubung antara nihilisme dan hermeneutika (filsafat interpretasi).[23] Jadi, singkatnya, nihilisme dan filsafat perbedaan (*philosophy of difference*) menandai perkembangan post-modernisme yang pada gilirannya merupakan asas bagi penolakan terhadap kebenaran transenden.

Atmosfir pemikiran post-modern dapat digambarkan melalui pernyataan bahwa "segala sesuatu adalah teks, yakni material dasar dari teks, masyarakat dan bahkan nyaris segala sesuatu adalah makna, dan semua makna harus didekonstruksi; pernyataan tentang realitas objektif harus dicurigai".[24] Formulasi Gellner adalah tepat karena dalam diskursus para pemikir post-modernis dunia ini dianggap sebagai makna. Bahkan segala sesuatu adalah makna dan makna adalah segala sesuatu, dan hermeneutika adalah "nabinya". Di sini yang dipentingkan adalah interpretasi terhadap realitas objektif dan bukan realitas objektifnya itu sendiri. Sebab, dalam alam pikiran postmodern, kebenaran objektif telah digantikan oleh kebenaran hermeneutika.[25] Artinya, dalam kebenaran hermeneutika,

[23]*Ibid.,* xiii.

[24](Teks asli: Everything is text, that the basic material of text, societies and almost anything is meaning, that meaning are there to be decoded or 'deconstructed', that the notion of objective reality is suspect). Lihat Ernest Gellner, *Postmodernism, Reason*, *and Religion* (London-New York: Routledge, 1993), 23.

[25]*Ibid.*, 35.

subjektivitas pencari kebenaran, pembaca atau pendengar sangatlah dihargai.

Dalam kondisi yang seperti ini, Ernest Gellner menyatakan bahwa posmodernisme nampak jelas mendukung paham relativisme. Kebenaran bagi posmodernis adalah *elusive* (kabur), subjektif, dan internal. Oleh sebab itu, para pendukung posmodernisme tidak bisa menerima ide tentang kebenaran tunggal, ekslusif, objektif, ekternal, dan transenden.[26]

Singkatnya, filsafat post-modern melebur nilai tertinggi, menyingkirkan Tuhan dan rujukan segala bentuk nilai yang menjadi fondasinya. Nilai baru yang diperkenalkan post-modernisme adalah nilai yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai lain atau bahkan saling tukar menukar karena ia memiliki status yang sama dalam wajah yang universal. Oleh sebab itu bentuk segala macam nilai adalah nilai yang layak untuk saling tukar menukar antara satu peradaban dengan peradaban lain. Di sini lagi-lagi nampak bahwa metafisika tradisional mulai melebur dan tenggelam. Agama tidak lagi berhak mengklaim punya kuasa lebih terhadap sumber-sumber nilai yang dimiliki manusia seperti yang telah diformulasikan oleh para filosof. Jadi, agama dipahami sebagai sama dengan persepsi manusia sendiri yang tidak mempunyai kebenaran absolut. Oleh karena itu agama mempunyai status yang kurang lebih sama dengan filsafat dalam pengertian tradisional. Inilah yang menjadi sumber paham pluralisme.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dari modernisme liberalisme menimba paham (1) rasionalisme, (2) sekularisme, (3) empirisisme (positivisme), (4) dualisme atau dikotomi, dan (5) humanisme, sedangkan dari posmodernisme akar liberalisme dimulai dari (1) pengingkaran terhadap kebenaran absolut, (2) penghapusan metafisika, (3) penghapusan nilai (*dissolution of value*) alias nihilisme yang kemudian melahirkan doktrin subjektivitas dan relativitas kebenaran yang mendorong pluralisme sosial dan agama, dan (4) persamaan (*equality*) yang mendorong lahirnya gerakan feminisme dan wacana gender.

[26]*Ibid.,* 24.

Kondisi Religio-Politik. Merujuk definisi liberalisme di atas jelas bahwa yang menjadi asasnya adalah kebebasan berfikir, berpendapat dan pembelaan terhadap kebebasan itu. Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti independen secara intelektual, berpikiran luas, terus terang, dan terbuka. Dari kebebasan yang tidak ada batasnya inilah liberalisme berkembang dari masalah politik dan ekonomi kepada bidang agama. Kebebasan intelektual adalah aspek yang paling mendasar dari liberalisme sosial dan politik atau dapat pula disebut sisi lain dari liberalisme sosial dan politik.

Sejarah kelahiran dan perkembangan liberalisme di Barat terjadi pada akhir abad ke-18, tetapi akar-akarnya dapat dilacak seabad sebelumnya (abad ke-17). Di saat itu dunia Barat terobsesi untuk membebaskan diri mereka dalam bidang intelektual, keagamaan, politik dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural, dan bahkan Tuhan. Pada saat itulah (tahun 1789) terjadi Revolusi Perancis yang antara lain mengusung ide kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepecayaan, berbicara, pers dan politik. Prinsip-prinsip Revolusi Perancis itu akhirnya dianggap sebagai *Magna Charta* liberalisme. Konsekuensinya adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan; penyingkiran agama dari kehidupan publik dan menjadikannya bersifat individual belaka. Selain itu, agama Kristen dan Gereja harus dicegah agar tidak menjadi lembaga hukum ataupun sosial. Ciri liberalisme pemikiran dan keagamaan yang paling menonjol adalah pengingkaran terhadap semua otoritas yang sesungguhnya sebab otoritas dalam pandangan liberal menunjukkan adanya kekuatan di luar dan di atas manusia yang mengikatnya secara moral. Ini sejalan dengan doktrin nihilisme yang merupakan ciri khas pandangan hidup Barat postmodern yang telah disebutkan di atas.

Liberalisme intelektual yang mencoba untuk bebas dari agama dan dari Tuhan itu kemudian tumbuh menjadi liberalisme pemikiran keagamaan yang disebut juga *theological liberalism*. Perkembangan liberalisme pemikiran kaagamaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase perkembangan. Fase *pertama*, mulai abad ke 17, dimotori oleh filosof Perancis Rene Descartes

yang mempromosikan doktrin rasionalisme atau *Enlightenment* yang berakhir pada pertengahan abad ke-18. Doktrin utamanya adalah (1) percaya pada akal manusia, (2) keutamaan individu, (3) imanensi Tuhan, dan (4) meliorisme (percaya bahwa manusia itu berkembang dan dapat dikembangkan). Fase *kedua* bermula dari akhir abad ke-18 dengan doktrin Romantisisme yang menekankan pada individualisme, artinya individu dapat menjadi sumber nilai. Kesadaran-diri (*self-consciousness*) itu dalam pengertian *religious* dapat menjadi Kesadaran-Tuhan (*god-consciousness*). Tokohnya adalah Jean-Jacques, Immanuel Kant, dan Friedrich Schleiermacher, dan lain-lain. Adapun fase *terakhir* bermula pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20 yang ditandai dengan semangat modernisme dan posmodernisme yang menekankan pada ide tentang perkembangan (*notion of progress*). Agama kemudian diletakkan sebagai sesuatu yang berkembang progresif dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern serta diharapkan dapat merespons isu-isu yang diangkat oleh kultur modern. Itulah sebabnya kajian mengenai doktrin-doktrin Kristen kemudian berubah bentuk menjadi kajian psikologis pengalaman keagamaan (*psychological study of religious experience*), kajian sosiologis lembaga-lembaga dan tradisi keagamaan (*sociological study of religious institution*), kajian filosofis tentang pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan (*philosophical inquiry into religious knowledge and values*).[27]

Sementara itu, pada abad ke-19, liberalisme dalam pemikiran keagamaan Katholik Roma berbentuk gerakan yang mendukung demokrasi politik dan reformasi gereja, tetapi secara teologis tetap mempertahankan ortodoksi. Sedangkan dalam pemikiran Kristen Protestan liberalisme merupakan *trend* kebebasan intelektual yang menekankan pada substansi etis dan kemanusiaan Kristen dan mengurangi penekanan pada teologi yang dogmatis. Tak ayal, dengan masuknya paham liberalisme ke dalam pemikiran keagamaan, praktis banyak konsep dasar dalam agama Kristen yang berubah. Nicholas F. Gier, dari University

[27]*The New Encyclopedia of Britanica*, vol. 11 (Chicago: University of Chicago, 1991), 693.

of Idaho, Moscow, Idaho[28] menyimpulkan lima karakteristik pemikiran tokoh-tokoh liberal Amerika Serikat. *Pertama*, percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhan dalam kepercayaan Kristen Orthodok. Karena Tuhan mereka tidak orthodok, mereka seringkali disebut Atheist. Ciri-ciri Tuhan menurut kitab suci dan doktrin agama sebagai *person* dengan sifat-sifat khusus ditolak oleh kelompok liberal karena mereka lebih menyukai konsep Tuhan yang diambil dari akal manusia. Tuhan, bagi mereka, dianggap tidak mengetahui kehidupan manusia secara detail dan tidak mencampuri urusan individu manusia. Perkembangan ini seakan menggambarkan perubahan keyakinan orang Barat yang sebelumnya percaya *God created man* kini berubah menjadi *Man created god.*

Kedua, kaum liberal memisahkan antara doktrin Kristen dan etika Kristen. Dengan mengurangi penekanan pada doktrin atau kepecayaan, mereka berpegang pada prinsip bahwa Kristen dan non-Kristen harus saling menerima dan berbuat baik. Seseorang menjadi religius bukan hanya afirmasi terhadap dogma, tapi karena etika dan perilaku moralis seseorang. Inilah yang membawa kelompok liberal untuk berkesimpulan bahwa orang atheist sekalipun dapat menjadi moralis.

Ketiga, kaum liberal tidak ada yang percaya pada doktrin Kristen Orthodok. Mereka menolak sebagian atau keseluruhan doktrin-doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, perawan yang melahirkan, Bibel sebagai kata-kata Tuhan secara literal, takdir, neraka, setan, dan penciptaan dari tiada (*creatio ex nihilo*). Doktrin satu-satunya yang mereka percaya, selain percaya akan adanya Tuhan, adalah keabadian jiwa.

Keempat, menerima secara mutlak pemisahan gereja dan negara. Para pendiri negara Amerika menyadari akibat dari pemerintahan negara-negara Eropa yang memaksakan doktrin suatu agama dan menekan agama lain. Maka dari itu kata-kata "Tuhan" dan "Kristen" tidak terdapat dalam undang-undang. Ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama liberal dalam konvensi konstitusi tahun 1787.

[28]Nicholas F. Gier, "Religious Liberalism and The Founding Fathers", dalam Peter Caws (ed). *Two Centuries of Philosophy in America* (Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1980), 22-45.

Terakhir, *kelima*, percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama. Pada mulanya toleransi dibatasi hanya pada sekte-sekte dalam Kristen, tetapi toleransi dan kebebasan penuh bagi kaum atheis dan pemeluk agama non-Kristen hanya terjadi pada masa Benyamin Franklin, Jefferson, dan Madison. Kebebasan beragama sepenuhnya berarti bukan hanya kebebasan dalam beragama, tapi bebas dari agama juga; artinya, bebas beragama, dan bebas untuk tidak beragama.

Barat sendiri melihat masalah liberalisme dari kacamata dikotomik yang membandingkan secara kontras antara dua hal: konservatisme dan liberalisme. Yang pertama cenderung mengutamakan berdirinya institusi, tradisi, dan nilai-nilai serta percaya bahwa tanpa itu semua akan mengakibatkan kekacauan sosial. Konservatisme juga dianggap merendahkan manusia karena percaya segala yang baik hanya datang dari Tuhan. Kaum konservatif cenderung melihat manusia sebagai statis dan melihat manusia hanya dalam dua kutub: pejuang Tuhan dan pejuang setan. Sementara, liberalisme dianggap lebih bersikap positif terhadap manusia, kemampuannya dan kesempurnaannya. Manusia dianggap makhluk yang terus berkembang sifatnya, pemahamannya, dan moralitasnya. Manusia, karena itu, dianggap mampu menentukan kehidupan mereka sendiri dan karenanya segala perbuatan manusia adalah milik individu yang tidak boleh dicampuri oleh lembaga atau orang lain. Liberalisme menekankan pada hak-hak individu, menentang kekuasaan, dan otoritas resmi. Di sini pengaruh kultur Barat modern dan posmodern yang individualistis begitu nyata dan radikal. Lantaran radikalnya itu mereka percaya bahwa manusia mampu menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik.

Tegas kata, sejatinya, ciri liberalisme dalam bidang sosial, politik, dan pemikiran keagamaan di Barat adalah mempersoalkan konsep Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan-Nya, memarginalkan agama atau memisahkan agama dari urusan sosial dan politik secara perlahan-lahan (sekularisme), mensubordinasikan gereja ke bawah kepentingan politik dan humanisme, serta mengurangi pentingnya teologi dalam bidang-bidang kehidupan dan lebih mementingkan etika dan moral. Akhirnya, liberalisme pemikiran keagamaan menjadi

berarti marginalisasi agama itu sendiri sekaligus penghapusan absolutisme dengan menggunakan piranti lunak posmodernisme yang menjunjung tinggi pluralisme, persamaan (*equality*), dan relativisme. Puncak dari itu semua adalah tuntutan kebebasan untuk lepas dari agama, bebas beragama apa saja, dan bebas untuk tidak beragama.

Liberalisme, dalam bidang sosial dan politik serta pemikiran keagamaan, ternyata merupakan *trend* yang dominan di Barat saat ini. Francis Fukuyama dalam bukunya, *The End of History, and the Last Man*, bahkan mengemukakan tesisnya sebagai berikut:

> … the principle of liberty and equality underlying the modern liberal state had been discovered and implemented in the most advance countries, and that there were no alternative principles or forms of social and political organization that were superior to liberalism. Liberal societies were, in other words, …would therefore bring the historical dialectic to a close.[29]

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa wajah peradaban Barat yang liberal itu merupakan bentuk final dan ideal dari sistem sosial dan politik serta keagamaan Barat, tidak ada sistem lagi yang sebaik liberalisme. Kini paham liberalisme di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan yang merupakan sistem final kehidupan sosial di Barat itu diekspor ke negara-negara dunia ketiga termasuk ke dalam dunia Islam. Melalui gerak westernisasi, paham liberalisme itu disebarkan ke berbagai belahan dengan membiakkan ide, pandangan, konsep dan prinsip tentang sekularisme, rasionalisme, kebebasan berpikir, persamaan gender, relativisme, dan pluralisme agama.

Program dan Gerakan Liberalisasi

Pemikiran liberal datang ke dunia Islam bersamaan dengan arus globalisasi, yaitu suatu fenomena internasional di mana

[29](Terjemah: prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang mendasari negara liberal modern telah ditemukan dan diimplementasikan pada negara-negara maju, dan tidak ada prinsip atau bentuk alternatif organisasi sosial dan politik yang lebih superior daripada liberalisme. Dengan kata lain, masyarakat-masyarakat liberal akan menjadikan dialektika sejarah berakhir). Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: Avon Book, 1992), 64.

bangsa-bangsa di dunia ketiga terkondisikan untuk menerima kultur, tradisi, dan nilai-nilai yang dianggap global (mendunia/universal) yang umumnya datang dari Barat. Dengan itu bangsa-bangsa yang lemah dituntut untuk menerima kultur, tradisi, dan nilai-nilai bangsa-bangsa yang kuat terutama Barat. Alhasil globalisasi menjadi tidak berbeda dari westernisasi. Bangsa-bangsa Barat yang secara ekonomi, politik, dan budaya dianggap cukup kuat itu merasa perlu dicontoh dalam segala hal oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa Timur, tak terkecuali bangsa Muslim, melalui berbagai macam strategi politik, akademik, dan kultural dipengaruhi dan terpengaruh untuk mengikuti cara berpikir bangsa Barat. [30]

Strategi mutakhir bagaimana pemikiran liberal itu dimasukkan ke dalam pemikiran umat Islam dapat disimak dari sebuah buku yang berjudul *Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies*, (2003). Buku yang ditulis oleh Cheryl Bernard[31] ini menjelaskan tentang strategi dan taktik pemikiran yang perlu dilakukan Barat untuk menghadapi umat Islam pasca 11 September. Targetnya untuk melawan apa yang mereka istilahkan dengan "terorisme dan fundamentalisme" dalam Islam. Bahkan setelah menulis buku ini ia menulis buku lain berjudul "*U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11* (2004), *The Muslim World After 9/11* (2004), dan *Three Years After: Next Steps in the War on Terror* (2005). Cheryl Bernard menulis buku ini di bawah proyek penelitian sebuah lembaga swadaya masyarakat di

[30]Cara-cara negara Barat mengajar bangsa-bangsa lain dalam pembangunan yang materialistis adalah dengan konsep modernisasi. Lihat misalnya, J.W. Schoorl, *Modernisasi…,* 4.

[31]Cheryl Bernard adalah sosiolog yang pernah menulis novel-novel feminis yang memojokkan ulama dan menyatakan wanita dalam Islam itu tertindas. Jilbab, menurutnya, diambil dari pemahaman yang salah terhadap al-Qur'an dan merupakan simbol pemaksanaan dan intimidasi. Suaminya adalah Zalmay Khalilzad, blasteran Afghan-Amerika yang menjadi asisten khusus Presiden George W. Bush dan Ketua Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council* (NSC) khusus untuk teluk Persia dan Asia Barat-Daya. Selain itu, pada tahun 1980, ia bekerja di bawah Paul Wolfowitz pada *Policy Planning Council*. Pada saat terjadi perang terhadap Iraq tahun 1991, Zalmay menjadi sekretaris menteri pertahanan.

Amerika, Rand Corporation.[32] Tujuan dari buku ini adalah untuk pemberantasan ekstrimisme, "fundamentalisme", sekaligus menyebarkan pemikiran liberal ke tengah-tengah umat Islam.

Lewat buku tersebut, Bernard memberi sejumlah masukan kepada pemerintah Amerika. *Pertama*, tentang nilai-nilai mana dalam Islam yang bisa diseret ke dalam nilai-nilai Amerika. *Kedua*, mengenai peta masalah-masalah umat Islam dalam konteks nilai-nilai Amerika. Akhirnya, muncullah saran-saran agar isu-isu seperti demokrasi dan HAM, hukuman bagi kriminalitas, keadilan, masalah minoritas, pakaian wanita, hak-hak suami-istri, dan sebagainya dipersoalkan dan diwacanakan ke tengah umat Islam. Saran-saran itu telah dilaksanakan dengan baik di Indonesia.

Untuk membuktikan bahwa liberalisasi adalah sebuah program dan gerakan untuk menghapus fundamentalisme, berikut ini dipaparkan bagaimana strategi Barat dalam menghadapi Islam. Paparan tersebut didasarkan pada laporan yang membagi umat Islam ke dalam empat kelompok yang juga menyertakan saran bagaimana seharusnya sikap pemerintah Amerika terhadap kelompok-kelompok dalam diri umat Islam tersebut. Keempat pengelompokan tersebut adalah (1) fundamentalis, yaitu kelompok yang menolak nilai-nilai demokrasi dan kultur Barat kontemporer. Mereka menginginkan negara autoritarian dan murni untuk melaksanakan hukum dan nilai-nilai moral Islam, tetapi mau menggunakan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka; (2) tradisionalis, yakni kelompok yang menginginkan masyrakat tetap konservatif, selalu curiga terhadap modernitas, segala bentuk inovasi, dan perubahan; (3) modernis, yaitu kelompok yang menginginkan agar dunia Islam menjadi bagian dari modernitas global. Mereka ingin memodernisasi Islam agar sejalan dengan perkembangan zaman; (4) sekularis, yaitu kelompok yang menginginkan dunia

[32]Rand Corporation adalah sebuah lembaga riset yang mengklaim sebagai lembaga independen yang membuat "analisis objektif dan solusi efektif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun individu di seluruh dunia". Lembaga ini dibiayai oleh Smith Richardson Foundation. Di lembaga ini Bernard menulis untuk Divisi Riset Keamanan Nasional (*National Security Research Division*) di mana suaminya bekerja.

Islam menerima pemisahan gereja dan negara sebagaimana yang terjadi pada demokrasi industri Barat di mana agama diposisikan sebagai urusan pribadi.

Dari keempat kelompok tersebut yang mendapat dukungan adalah kelompok modernis (termasuk mereka yang menamakan diri "Islam Liberal") karena dianggap sesuai dengan peradaban Barat. Lebih lengkap Bernard bertutur:

> Dari semua kelompok, kelompok ini (modernis/liberal) adalah yang paling bersahabat terhadap nilai-nilai dan jiwa masyarakat demokratis modern. Modernisme, dan bukan tradisionalisme, adalah yang membantu Barat. (Misi kelompok) ini menyangkut perlunya menyimpangkan (*to depart from*), memodifikasi (*to modify*), dan mengenyampingkan secara selektif elemen-elemen doktrin keagamaan yang orisinal (*selectively ignore elements of the original religious doctrine*). Kitab Perjanjian Lama tidaklah berbeda dari al-Qur'an dalam menghukumi perilaku dan mengontrol sejumlah peraturan dan nilai-nilai yang tidak dapat dipahami secara literal oleh masyarakat masa kini. Ini tidak masalah sebab saat ini hanya sedikit sekali orang yang mempertahankan agar kita semua hidup yang secara literal sama dengan Bible. Sebaliknya, kita sepakat pada visi bahwa misi yang sebenarnya dari Yahudi dan Kristen itu mengungguli (makna) literal teks, yang sebenarnya telah kita anggap sebagai sejarah dan legenda belaka. Ini adalah persis seperti pendekatan yang diambil oleh modernist Muslim.[33]

Begitulah strategi yang disarankan Bernard kepada kementerian Pertahanan Amerika melalui LSM yang bernama RAND Coorporation. Saran-saran strategis tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah AS dan nampak dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam, khususnya di Indonesia. Dari bahasa yang digunakan seperti "mempengaruhi", "memodifikasi", dan "mengubah" menjadi jelas bahwa Barat menganggap Muslim inferior dan karenanya harus disesuaikan dengan Barat. Umat Islam hanya menjadi objek yang perlu dipengaruhi pemikiran dan keyakinan mereka.

Berdasarkan klasifikasi tersebut Bernard memberi saran-saran bagaimana menghadapi masing-masing kelompok. Di akhir saran, ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil disesuaikan dengan strategis tidaknya isu yang berkembang.

[33]Cheryl Bernard, *Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies* (Santa Monica: the RAND Corporation, 2003), 53.

Saran-saran untuk menghadapi keempat kelompok tersebut dilengkapi dengan teknis pelaksanaannya. Saran-saran dimaksud sebagai berikut.

1. Dukunglah pertama-tama kelompok modernis dan sekularis dengan cara (i) menerbitkan dan menyebarkan karya-karya mereka dengan subsidi; (ii) menyebarkan pandangan mereka dalam masalah penafsiran agama yang fundamental kepada orang awam, agar bersaing dengan pendapat dan pandangan fundamentalis dan tradisionalis; (iii) mengembangkan kesadaran tentang sejarah dan kultur sebelum Islam dan non-Islam melalui media masa dan kurikulum sekolah di negara-negara tertentu; dan (iv) mendorong serta mendukung lembaga-lembaga sekuler dan sipil berikut seluruh programnya.

2. Dukunglah kelompok tradisionalis melawan kaum fundamentalis dengan cara (i) mempublikasikan kritik-kritik tradisionalis terhadap kekerasan dan ekstrimisme kaum fundamentalis sekaligus mendorong tumbuhnya perselisihan antarkedua kelompok; (ii) mencegah persatuan antara kaum tradisionalis dan fundamentalis; dan (iii) mendorong kerjasama antara kaum modernis dan tradisonalis.

3. Hadapi dan tantang kelompok fundamentalis dengan cara (i) menantang dan mengekspose ketidakakuratan pandangan mereka dalam soal penafsiran Islam; (ii) membongkar hubungan mereka dengan kelompok dan aktivis ilegal; (iii) menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memerintah; iii) menjauhkan rasa respek atau pemujaan terhadap tindak kejahatan kelompok fundamentalis, ekstrimis, dan teroris; dan (iv) mendorong para wartawan untuk menyelidiki isu korupsi, kemunafikan, dan tidak amoral kelompok fundamentalis dan teroris.

4. Dukung kaum sekularis secara selektif dengan cara (i) mendorong pengakuan bahwa fundamentalisme adalah musuh bersama; (ii) mencegah persatuan sekularis dengan gerakan anti-kekuatan Amerika seperti nasionalisme dan ideologi kiri; dan (iii) mendukung ide bahwa agama dan negara itu dalam Islam dapat dipisahkan.

Seluruh saran Bernard tersebut dilaksanakan dengan baik oleh Amerika Serikat melalui kebijakan bantuan luar negerinya. Target bantuan itu tidak lain adalah untuk mengubah cara

berpikir dan berkeyakinan umat Islam dan untuk *medium*-nya adalah pendidikan. Maka dari itu, Donald Rumsfeld terang-terangan menyatakan bahwa "Amerika Serikat perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat. Lembaga pendidikan Islam bisa lebih cepat menumbuhkan teroris baru. Lebih cepat dibandingkan kemampuan AS untuk menangkap atau membunuh mereka".[34] Istilah moderat digunakan untuk lebih melunakkan istilah liberal meskipun moderat itu pada kenyataannya adalah liberal. Namun, sebaliknya, dengan bahasa ekstrim digunakanlah istilah "pendidikan Islam yang radikal" yang pada kenyataannya tidak ada. Jika demikian, kurikulum yang akan diubah itu adalah semua kurikulum di semua jenjang pendidikan Islam.

Lembaga donor yang dimaksud Donald Rumsfeld dan yang kini aktif bergerak, antara lain, adalah The Asia Foundation (TAF). Di antara programnya disebutkan sebagai berikut:

> Recognizing the importance of reinforcing inclusive and pluralist values within Indonesia's Muslim majority population, The Asia Foundation has been supporting a diverse group of mass-based Muslim groups since 1970s. In the context of an increasingly diverse Islamic society in Indonesia, The Foundation now support over 30 Muslim non-Government organization (NGO), in their efforts to promote the concept that Islamic values can the basis for a democratic political system, non-violence, and religious tolerance. In the area of civic education, human right, intercommunity reconciliation, gender equality, and inter-faith dialogue, the Foundation works with these NGO's and mass-based organization in their effort to make Islam a catalyst for democratization in Indonesia. …The programs include training for religious leaders, studies examining gender issues and human rights in Islam, civic education course at Islamic institute, Muslim women's advocacy centers and the strengthening the pluralist and tolerant Islamic media.[35]

Dari pernyataan di atas jelas sekali bahwa misi donasi Barat adalah untuk menyebarkan nilai-nilai inklusif dan pluralis dalam masyarakat Muslim Indonesia, mempromosikan sistim politik demokratis, antikekerasan, penyatuan komunitas, persamaan

[34]Harian Republika, 3/12/2005.

[35]Lihat http://www.asiafoundation.org/Locations/indonesia.html

gender, HAM, dialog antaragama, pendidikan sipil, dan sebagainya. Dari program bantuan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran umat Islam itu, TAF, Ford Foundation, Libforall, dan yayasan-yayasan lainnya mengucurkan dana untuk mensubsidi penerbitan buku-buku yang berisi paham-paham tersebut. Hasilnya kini di Indonesia banyak terbit buku-buku atas bantuan dan kerja sama yayasan-yayasan tersebut. Bahkan, LSM-LSM baru bermunculan dengan membawa misi pluralisme, liberalisme, freedom, dan feminisme. Jika di tahun 70-an misi LSM-LSM di Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat, kini misi LSM-LSM itu telah berubah untuk meliberalkan pemikiran umat Islam. Karena hanya dengan misi demikian mereka dapat dana besar dari Barat.

Selain itu, disebutkan pula bahwa The Asia Foundation bersama USAID (US Agency for International Development) juga mempunyai program reformasi pendidikan di seluruh Indonesia baik pendidikan formal maupun informal, termasuk reformasi pendidikan di pesantren. Dalam reformasi itu nanti akan diajarkan mata pelajaran tentang semua agama (pluralisme agama), pendidikan sipil, dan pengembangan kurikulum. Selain itu, akan diadakan workshop-workshop, *training* pedagogi, dan kursus serta tutorial tentang prinsip-prinsip pluralisme, multikulturalisme, dan demokrasi. Semua itu merupakan usaha Barat untuk mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Pernyataan di bawah ini lebih menjelaskan lagi hal itu.

> Washington berinvestasi puluhan juta dolar dalam kampanye untuk *mempengaruhi* bukan saja masyarakat Islam, tapi juga Islam sendiri dan apa yang terjadi dalam Islam. Pada lebih dari dua lusin negara, Washington diam-diam mendanai radio Islam, show tv, mata pelajaran di sekolah, kelompok studi Muslim, workshop-workshop politik dan progam lain yang *mempromosikan Islam moderat* (baca: Liberal).[36]

Berlandas pernyataan tersebut menjadi jelaslah bahwa akar pemikiran Islam liberal adalah program politik dan kebudayaan Barat. Dalam program tersebut dimasukkanlah ide-ide

[36]David E. Kaplan, "Hearts, Minds and Dollars," dalam www.usnews.com diakses pada 25 April 2005. Cetak miring (*italic*) dan dalam kurung (baca: liberal) dari penulis.

pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan feminisme dan gender ke dalam pemikiran Islam dengan memodifikasi dan mengubah pemahaman umat Islam terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Dengan cara ini diharapkan umat Islam mau berwacana dan kemudian menerapkan konsep tentang pluralisme, multikulturalisme, feminisme, humanisme dan masyarakat sipil (*civil society*).

Liberalisasi Pemikiran Islam

Sejalan dengan saran-saran Bernard di atas, hal pertama yang menjadi fokus gerakan Islam Liberal adalah melakukan "ijtihad" dalam segala bidang dengan mengubah penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis. Dalam situsnya, Jaringan Islam Liberal menyebutkan sejumlah landasan ijtihad mereka itu. Beberapa landasan tersebut dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.[37]

Pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Menurut pandangan kelompok liberal pintu ijtihad kini tertutup dan harus dibuka dalam semua bidang termasuk bidang *mu'amalat, ubudiyat*, dan *ilahiyat*.

Kedua, menafsirkan teks al-Qur'an dan hadis secara liberal dengan mengutamakan semangat religio-etik. Dalam penafsiran liberal ini al-Qur'an bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah swt. kepada Nabi Muhamad saw, melainkan merupakan produk budaya (*muntaj tsaqafi*) sebagaimana yang dicetuskan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika karena metode tafsir konvensional tidak sesuai dengan zaman. Sebagian tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama ini dianggap telah melanggengkan *status quo* dan kemerosotan umat Islam secara moral, politik, dan budaya.[38] Kajian terhadap hadis harus harus disertai kritik terhadap perawi-perawi hadis, terhadap hadis *mutawatir*, bahkan terhadap ideologi Islam. Meski melancarkan kritikan terhadap para mufassir dan para perawi hadis dan hadis-hadis mutawatir,

[37]Achmad Rosidi, "Faham Liberal. Masyarakat Kota Yogyakarta", dalam *Faham-faham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan* (Jakarta: Hasil Penelitian Badan Litbang Departemen Agama, 14 November 2006), 6.

[38]Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan* (Jakarta: Teraju, 2002), xxv-vi, 10.

kelompok liberal mengklaim bahwa mereka tidak memihak atau tidak menentukan benar atau salah.

Ketiga, berpihak kepada minoritas tertindas dan mewujudkan keadilan sejati, baik etnis, agama maupun gender. Karena prinsip inilah kelompok liberal menentang fatwa MUI dan membela minoritas Ahmadiyah dan LDII. Mereka berkeyakinan bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia sebagai makhluk Tuhan yang mendapatkan perlakuan sama di depan Tuhan dan menusia serta makhluk lainnya. Bahkan kaum gay dan lesbi adalah makhluk Tuhan dan harus diperlakukan sama untuk mendapatkan hak-hak mereka. Keadilan merupakan nilai-nilai universal dalam Islam yang harus ditegakkan di muka bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi, sedangkan ketidakadilan adalah musuh besar Islam.

Keempat, kebebasan beragama. Kelompok liberal berpendapat bahwa memeluk suatu agama adalah hak setiap individu, apakah seseorang itu memeluk Islam, Kristen, Katholik, Hindu, atau Buddha. Bahkan setiap pribadi berhak menjadi atheis. Kebenaran berada pada setiap agama dan semuanya memiliki satu tujuan, yaitu pada Tuhan, sebagaimana dikatakan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya agar memasuki negeri dari berbagai pintu (*abwâb mutafarriqah*). Semua agama, bagi kelompok liberal, merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama, memilliki tujuan dan mengabdi pada Tuhan yang sama, dan kebenaran itu pada semua agama. Islam yang dipahami bukan Islam sebuah nama, tetapi agama yang memiliki sikap kepasrahan, tunduk, dan patuh kepada Tuhan. Letak perbedaannya, menurut kelompok liberal, adalah aspek lahiriyah, penampilan dan tata cara beribadah serta jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Agama-agama itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada yang satu, karena memancar dari yang satu. Mengklaim agama sendiri paling benar akan menempatkan seseorang pada sikap ekslusif partikular dan hanya menimbulkan disharmoni antarumat beragama.

Kelima, memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas agama dan politik. Kelompk liberal menentang otoritas keagamaan karena dianggap akan memberi pengaruh negatif dengan memonopoli kebenaran dan menghukum pandangan

yang tidak sejalan sebagai tidak Islami, sexta, dan sebagainya. Secara implisit penolakan otoritas keagamaan berarti memberi ruang bagi kelompok liberal untuk memegang otoritas menafsirkan agama dengan bebas. Prinsip yang dianut kelompok liberal sejalan dengan liberalisme di Barat, yaitu kebebasan berfikir (*freedom of thought*) yang dikembangkan menjadi kebebasan menafsirkan agama (*freedom of religious interpretation*). Sejalan dengan sekularisme, kelompok liberal menempatkan agama dalam posisi yang sangat privat, harus dipisahkan dari kehidupan publik.

Berdasar lima landasan bagi penafsiran nash keagamaan di atas kelompok liberal menawarkan agenda untuk pemecahan masalah umat Islam. Berikut ini dipaparkan agenda tersebut dan kaitannya dengan agenda serta konsep-konsep liberalisme Barat.

Agenda Politik. Agenda ini dimaksudkan untuk mempengaruhi umat bagaimana seharusnya kaum Muslimin bersikap dalam masalah sistem pemerintahan. Alasan utama kelompok liberal, karena bentuk negara bukan pilihan ilahi, tapi pilihan manusia dan umat Islam lebih mengetahui urusan dunia mereka untuk menentukan sistem pemerintahan atau bentuk negara. Untuk itu, mereka menolak bentuk formal negara Islam dan mendukung bentuk negara demokrasi. Agenda ini sejalan dengan program TAF dan negara-negara Barat untuk menerapkan sistem demokrasi ke negara-negara Islam.

Agenda Toleransi Beragama. Agenda ini, menurut kelompok liberal, didorong oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah plural baik secara etnis, agama, bahasa, dan sebagainya. Meskipun sebenarnya situasi seperti ini telah dialami masyarakat muslim Madinah di zaman Nabi, dan juga umat Islam Indonesia sejak lama, tetapi kelompok liberal berusaha memasukkan prinsip-prinsip teologi pluralisme. Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dan penghargaan terhadap agama lain, tetapi kelompok liberal justru mengadopsi doktrin pluralisme yang dikembangkan sepenuhnya dari Barat. Akhirnya, agenda ini tidak hanya sebatas mengembangkan sikap toleransi di kalangan umat Islam, tetapi juga menebarkan konsep kesamaan agama-agama.

Agenda Emansipasi Wanita. Agenda ini dimaksudkan untuk mengajar kaum Muslimin agar memikirkan kembali doktrin keagamaan yang cenderung merugikan kaum wanita. Agenda yang dipengaruhi oleh gerakan feminisme dan gender di Barat ini dipicu oleh doktrin persamaan (*equality*). Oleh sebab itu, agendanya bukan menggali bagaimana ajaran Islam tentang wanita, tetapi meninjau kembali ajaran Islam yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin feminisme dan gender. Kelompok ini akhirnya menjadi sangat kritis terhadap Islam, dan menganggap Islam telah mendiskreditkan wanita, sementara doktrin feminisme yang lahir dari kondisi masyarkat Barat tidak mendapat kritikan sama sekali.

Agenda Kebebasan Berekspresi. Tuntutan kebebasan berekspresi merupakan gerakan awal menuju terbentuknya paham liberalisme di Barat. Tuntutan dalam kebebasan berekspresi ini oleh kelompok liberal dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga dijustifikasi dengan *ijtihad* dalam Islam. Namun, seperti disebutkan dalam prinsip-prinsip di atas, *ijtihad* bagi kelompok liberal mencakup seluruh bidang agama tanpa membedakan hal-hal yang sudah mapan secara hukum (*muhkamat*), atau hal-hal yang sudah *fixed* atau permanen dalam agama (*thawabit*) dari hal-hal yang memang berubah (*mutaghayyirat*) yang perlu terus disesuaikan dengan situasi sosial dengan *ijtihad*. Meskipun demikian, dalil yang digunakan tetap *fiqh* bahwa jika *ijtihad* benar akan mendapat pahala dua, jika salah akan mendapat pahala satu.[39]

Dari realitas pemikiran ini liberalisasi pemikiran Islam jelas merupakan respons terhadap tantangan globalisasi dan modernisasi atau lebih jelasnya dapat disebut sebagai gerakan responsif dan bukan kreatif. Dianggap responsif karena kenyataannya gagasannya tidak berangkat dari adanya suatu kajian serius terhadap khazanah pemikiran Islam oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam bidangnya, tapi bermula dari upaya cendekiawan muslim untuk merespons dan menjustifikasi konsep-konsep yang menjadi wacana utama di Barat.

[39]Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah* (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Lentera, 2006), 2.

Kerancuan Gerakan Liberalisasi

Liberalisasi pemikiran Islam yang diklaim sebagai *ijtihad* itu ternyata memiliki beberapa kerancuan konseptual. Dari istilah yang digunakan sudah jelas merupakan produk tradisi sosial, politik, dan keagamaan di Barat. Istilah mengandung makna dan makna mengandung konsep. Konsep yang terkandung dalam liberalisme dan liberalisasi itulah yang rancu jika diterapkan ke dalam ranah pemikiran Islam. Francis Fukuyama sendiri mengakui bahwa ajaran Islam bersifat universal dan memiliki nilai moralitas dan doktrin-doktrin politik dan keadilan sosialnya sendiri. Oleh sebab itu, Islam pernah menjadi tantangan bagi demokrasi liberal dan praktek-praktek liberal. Dan sebaliknya nilai-nilai liberal Barat juga merupakan ancaman bagi masyarakat Islam. Dalam hal ini Fukuyama menegaskan:

> Tidak diragukan lagi, dunia Islam dalam jangka panjang akan nampak lebih lemah menghadapai ide-ide liberal ketimbang sebaliknya, sebab selama seabad setengah yang lalu liberalisme telah memukau banyak pengikut Islam yang kuat. Salah satu sebab munculnya fundamentalisme adalah kuatnya ancaman nilai-nilai liberal dan Barat terhadap masyarakat Islam tradisional. [40]

Pernyataan Fukuyama bahwa Liberalisme telah memukau "banyak pengikut Islam yang kuat" terbukti. Di kalangan cendekiawan muslim kontemporer nama-nama seperti Mohammad Arkoun (*deconstruction*), Hasan Hanafi (*socialist*), Farid Esack (*pluralist*), Mohammad Syahrur (*deconstruction*), Nasr Hamid Abu Zayd (*Hermeneutics*), Aminah Wadud (*femenist*), Fatimah Mernissi (*feminits*), dan Abdullahi Ahmad al-Naim (*secularist*/liberal) dapat dimasukkan ke dalam cendekiawan Muslim yang disebut Fukuyama itu. Kajian lebih detail sudah tentu sangat diperlukan. Namun, dari kajian pemikiran mereka

[40](Teks asli: "Indeed, the Islamic world would seem more vulnerable to liberal ideas in the long run than the reverse, since such liberalism has attracted numerous and powerful Muslim adherent over the past century and a half. Part of the the reason for current, fundamentalist revival is the stregth of the perceived threat from liberal, Western values to traditional Islamic societies). Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: Avon Book, 1992), 45-6.

membukikan bahwa liberalisasi pemikiran Islam memiliki karakteristik yang tidak berbeda dari posmodernisme atau upaya-upaya untuk menjustifikasinya. Karakteristik pemikiran mereka dapat digambarkan dalam lima hal. *Pertama*, mendekonstruksi konsep-konsep dasar dalam Islam yang oleh para ulama disepakati telah jelas makna dan hukum-hukumnya (*muḥkamât*) untuk disesuaikan dengan atau menjustifikasi paham-paham arus utama dalam peradaban Barat yang sekurang-kurangnya terdiri atas (1) paham relativisme, (2) paham pluralisme agama, (3) paham persamaan gender dan feminisme, dan (4) paham demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*).

Kedua, liberalisasi pemikiran Islam hanya berkutat pada pencarian konsep-konsep tertentu dari dalam tradisi intelektual Islam untuk tujuan di atas. Di sini proses epistemologis yang berupa kajian kritis terhadap konsep-konsep Barat tersebut nampak sangat minim, kalau bukan justru tidak ada sama sekali.

Ketiga, liberalisasi tampaknya diarahkan untuk membentuk masyarakat sipil *a la* Barat dan karena itu agendanya tidak menyangkut masalah pembangunan disiplin ilmu keislaman atau pengembangan sistem kelembagaan serta masyarakat Islam. Jadi, liberalisasi tidak akan mengagendakan islamisasi ilmu pengetahuan, pengembangan ekononomi Islam, menciptakan sistem politik atau perguruan tinggi Islam. Padahal, kini peradaban Islam sedang mengalami krisis yang perlu diatasi dengan ilmu pengetahuan.

Keempat, di satu sisi liberalisasi yang ekstrim justru menunjukkan *taqlid* yang membabi buta terhadap Barat, sehingga, seperti halnya liberalisme di Barat, liberalisasi pemikiran Islam tidak berbeda dari pembebasan muslim dari agama, moralitas, tata nilai, dogma, politik, dan otoritas keagamaan Islam untuk diganti dengan nilai-nilai Barat.

Kelima, tajdîd atau pembaruan pemikiran Islam berkutat pada masalah-masalah yang konseptual yang bersumber pada pandangan hidup (*worldview*) Islam. Akan tetapi, liberalisasi berangkat dari pandangan hidup Barat. Asas pandangan hidup Islam yang paling fundamental adalah konsep ilmu dan iman. Namun, liberalisasi pemikiran tidak berangkat dari kajian

epistemologi Islam yang kuat dan akurat sehingga yang dihasilkan hanyalah kerja-kerja justifikasi yang tidak mendasar.

Catatan Akhir

Liberalisasi pemikiran keagamaan Islam yang akhir-akhir ini marak di kalangan mahasiswa dan dosen muslim di lingkungan perguruan tinggi Islam dan juga ormas Islam bukanlah pembaruan meskipun diklaim begitu. Ini juga bukan ide yang kreatif dan inovatif yang lahir dari hasil perenungan dan kajian terhadap struktur konsep dalam traidisi intelektual Islam. Ini hanyalah gagasan hasil "adopsi" atau duplikasi ide-ide dan konsep-konsep yang terdapat dalam tradisi keagamaan dan peradaban Barat. Terbukti dari gerakan liberalisasi ini lahir istilah-istilah yang rancu dan membingungkan (*confusing*). Selain itu, liberalisasi yang juga berarti dekonstruksi itu menafikan struktur dan konsep keilmuan dalam Islam dan pada saat yang sama juga merusak konsep-konsep dalam Islam.

Jika dengan liberalisasi pemikiran itu berhasil memprovokasi umat Islam agar menghilangkan kepercayaan pada otoritas ulama, konsep ilmu dalam Islam akan runtuh. Di antara jalan-jalan memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam adalah riwayat dan riwayat itu diperoleh melalui otoritas. Otoritas keilmuan dalam disiplin ilmu sekuler sekalipun sangat diperlukan. Para saintis, misalnya, tidak bisa lepas dari otoritas Albert Einstein, para ekonom tidak dapat lepas dari Adam Smith, dan seterusnya. Bila otoritas keilmuan dihilangkan, maka dunia ini akan hancur; segala sesuatu ditangani oleh orang yang memiliki otoritas. Selain itu, dalam Islam, iman, ilmu, pemikiran, dan amal itu saling berkaitan. Jika ilmu yang diperoleh muslim tidak menambah keimanan, ilmu tersebut justru menambah jauh dari Tuhan dan tentu kehilangan nilai ibadahnya.

Apabila liberalisasi dimaksudkan untuk memperkaya konsep-konsep dalam Islam, maka ia telah gagal sejak permulaan. Liberalisasi itu sendiri merupakan produk dari transmisi pemikiran asing ke dalam pemikiran Islam tanpa proses epistemologi yang memadai sehingga terjadi kerancuan konsep yang dapat diamati dari kerancuan istilahnya. Situasi seperti ini pernah dialami oleh ulama di masa lalu, di mana kaum muslim

berhadapan dengan peradaban asing seperti Persia, Yunani, Romawi, India dan Mesir. Namun, mereka secara epistemologis sangat siap sehingga konsep-konsep Islam nampak sangat dominan dalam peradaban baru itu.

Persoalannya, dapatkah peradaban Islam dibangun dengan konsep-konsep yang sepenuhnya berasal dari peradaban lain? Apakah Muslim telah siap dengan metodologi bagaimana menderivasi konsep-konsep dalam al-Qur'an sehingga menjadi konsep yang mapan? Apakah muslim juga siap dengan metode transmisi yang berupa adaptasi dan adopsi konsep-konsep asing ke dalam pemikiran Islam? Apakah muslim harus memaknai teks kitab suci secara tradisional dengan disiplin ilmu dalam Islam sendiri atau melepaskan teks dan mengorientasikanya kepada konteks kekinian yang dewasa ini dihegemoni oleh peradaban Barat? Tidakkah perlu alternatif pendekatan pemahaman yang tidak *melulu* tekstual dan tidak pula hanya kontekstual, tetapi pendekatan konseptual yang diorientasikan kepada problematika objektif umat Islam sehingga tidak sekadar merespons tantangan yang timbul pada dan ditimbulkan oleh masyarakat Barat? *Wa al-Lâh a`lam bi al-shawâb*. ●

Daftar Pustaka

Achmad Rosidi, "Faham Liberal Masyarakat Kota Yogyakarta", dalam *Faham-Faham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan* (Jakarta: Hasil Penelitian Badan Litbang Departemen Agama, 14 Nopember 2006).

Alain Finkielkraut, *The Defeat of the Mind*, ter. Judith Friedlander (New York: Columbia University Press, 1995).

Alain Touraine, *Critique of Modernity* (Oxford: Blackwell Publishing, 1995).

Alan Brinkley, *Liberalism and Its Discontents* (Harvard: Harvard University Press, 1998).

C.A.J. Coady, *Distributive Justice*: *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Goodin, Robert E. and Pettit (Oxford: Blackwell Publishing, 1995).

Cheryl Bernard, *Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies* (Santa Monica: the RAND Corporation, 2003).

David E. Kaplan, "Hearts, Minds and Dollars", *www.usnews.com* diakses pada 25 April 2005.

David Harvey, *The Condition of Postmodernity* (Cambridge: Blackwell, 1991).

Ernest Gellner, *Postmodernism, Reason and Religion* (London-New York: Routledge, 1993).

Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: Avon Book, 1992).

Friedrich Nietzche, *The Will to Power,* ter. Walter Kaufmann dan R.J. Hollingdale, ed. Walter Kaufmann (New York: Vintage Books, 1968).

_____, *Twilight of the Idol*, ter. R.J. Hollingdale (Harmondsworth: Penguin, 1968).

Geovani Vattimo, *The End of Modernity*, trans. Jon R. Snyder (Cambridge: Polity Press & Blackwell Publisher, 1988).

Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Hugh J. Silverman, "The Philosophy of Postmodernism", dalam, *Postmodernism-Philosophy and the Art*, ed. Hugh J. Silverman (London: Routledge, 1990).

Huston Smith, *Beyond the Post-Modern Mind: Quest Book* (Wheaton Illinois, USA: The Theosophical Publishing House, 1989).

Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan* (Jakarta: Teraju, 2002).

ISLAMIA, tahun I, no. 3 & 4.

J.W. Schoorl, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Berkembang*, ter. R.G. Soekadijo (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1981).

James E. Crimmins, (ed.), *Religions, Secularization, dan Political Thought* (London: Routledge, 1990).

James T. Kloppenberg, *The Virtues of Liberalism* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

John Gray, *The Two Faces of Liberalism* (New York: New York Press, 2000).

Muchit A Karim, "Paham Keagamaan Islam Liberal Pada Masyarakat Perkotaan di Makassar", dalam *Faham-Faham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan* (Jakarta: Hasil

Penelitian Badan Litbang Departemen Agama, 14 Nopember 2006).

Nancy Love, *Marx, Nietzsche, and Modernity* (New York: Columbia University Press, 1986).

Nicholas F. Gier, "Religious Liberalism and The Founding Fathers", dalam *Two Centuries of Philosophy in America*, ed. Peter Caws (Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1980).

S. M. N. al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993).

_____, *Risalah untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2000).

Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah* (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Lentera, 2006).

The New Encyclopedia of Britanica, vol. 11 (Chicago: University of Chocago, 1991).

Ulil Absar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Harian Kompas*, 18 November 2002.